

MENGEMBANGKAN POTENSI PARIWISATA DI DESA ADAT MELALUI INOVASI DAN KELEMBAGAAN

Dr. I MADE WENA

**BENDESA DESA ADAT KUTUH – BALI
[PENGELOLA KAWASAN WISATA PANTAI PANDAWA]**

**DISAMPAIKAN DALAM PANEL DISKUSI
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA, 17 DESEMBER 2018**

PENDAHULUAN (1)

PENGELOLAAN PARIWISATA BERBASIS DESA ADAT



TANAH LOT

**WISATA ALAM, SPIRITUAL,
DAN BUDAYA**

PENGELOLAAN :

**DESA ADAT BERABAN TABANAN
BEKERJASAMA DENGAN PEMDA
TABANAN**



ULUN DANU BERATAN

**WISATA ALAM, SPIRITUAL,
DAN BUDAYA**

PENGELOLAAN :

**DESA ADAT BERATAN TABANAN
BEKERJASAMA DENGAN PEMDA
TABANAN**

PENDAHULUAN (2)

PENGELOLAAN PARIWISATA BERBASIS DESA ADAT

SANGHEH MONKEY FOREST

WISATA ALAM

PENGELOLAAN :
DESA ADAT SANGHEH
BEKERJASAMA DENGAN PEMDA
BADUNG



UBUD MONKEY FOREST

WISATA ALAM

PENGELOLAAN :
DESA ADAT PADANG TEGAL
GIANJAR



PENDAHULUAN (3)

PENGELOLAAN PARIWISATA BERBASIS DESA ADAT

KAWASAN PANTAI PANDAWA WISATA ALAM - PANTAI

PENGELOLAAN :
DESA ADAT KUTUH
BEKERJASAMA DENGAN PEMDA
BADUNG



GUNUNG PAYUNG CULTURAL PARK WISATA ALAM - BUDAYA

PENGELOLAAN :
DESA ADAT KUTUH - BADUNG

PENDAHULUAN (4)

PENGELOLAAN PARIWISATA BERBASIS DESA ADAT

TAMAN BALI HARMONI – BUKIT ASAHA

WISATA ALAM

PENGELOLAAN :
DESA ADAT BUGBUG KABUPATEN
KARANGASEM



PANTAI MELASTI WISATA ALAM - PANTAI

PENGELOLAAN :
DESA ADAT UNGASAN KUTA
SELATAN - BADUNG

PENDAHULUAN (5)

PENGELOLAAN PARIWISATA BERBASIS DESA ADAT

DESA PENGLIPURAN DESA WISATA BUDAYA

PENGELOLAAN :
DESA ADAT PENGLIPURAN
KABUPATEN BANGLI



DESA TENGANAN PEGRINGSINGAN DESA WISATA BUDAYA

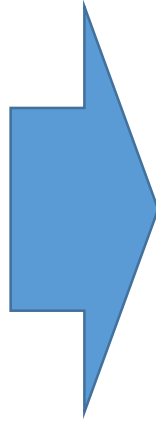
PENGELOLAAN :
DESA ADAT TENGANAN
PEGRINGSINGAN

PENDAHULUAN (6)

PENGELOLAAN PARIWISATA BERBASIS DESA ADAT

KULINER CAFÉ JIMBARAN WISATA KULINER

PENGELOLAAN :
DESA ADAT JIMBARAN KUTA
SELATAN - BADUNG



KULINER CAFÉ KEDONGANAN WISATA KULINER

PENGELOLAAN :
DESA ADAT KEDONGANAN –
KECAMATAN KUTA - BADUNG



PENDAHULUAN (7)

PENGELOLAAN PARIWISATA BERBASIS DESA ADAT

NUNGNUNG WATER FALL

WISATA ALAM

PENGELOLAAN :
DESA ADAT NUNGNUNG – PETANG –
BADUNG



DESA WISATA PEMUTERAN

WISATA ALAM - BAHARI

PENGELOLAAN :
DESA ADAT PEMUTERAN –
GEROKGAK - BULELENG



❑ UUD 1945 Pasal 18B (2) :

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang.”

❑ MASYARAKAT HUKUM ADAT adalah Persekutuan dari masyarakat adat dengan Indikator :

- Merupakan kesatuan dari manusia yg teratur (memiliki aturan)
- Mereka menetap di daerah tertentu (ada unsur sifat komunal)
- Mereka mempunyai penguasa (Kepala Adat)
- Mereka mempunyai kekayaan (Berwujud dan/atau Tidak Berwujud)



MASYARAKAT ADAT BALI



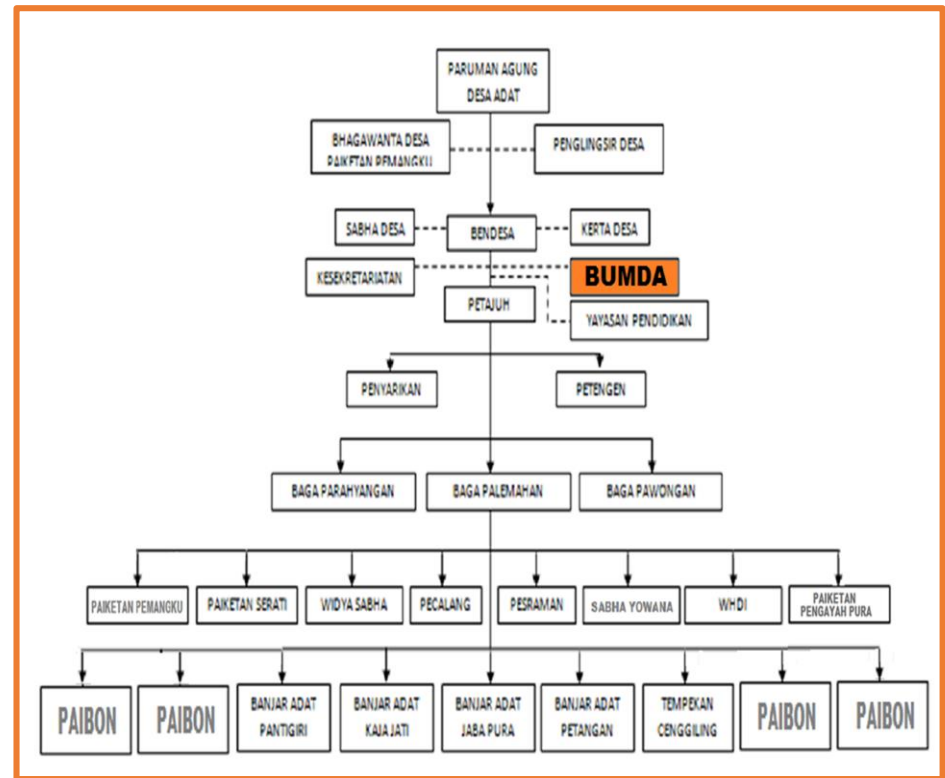
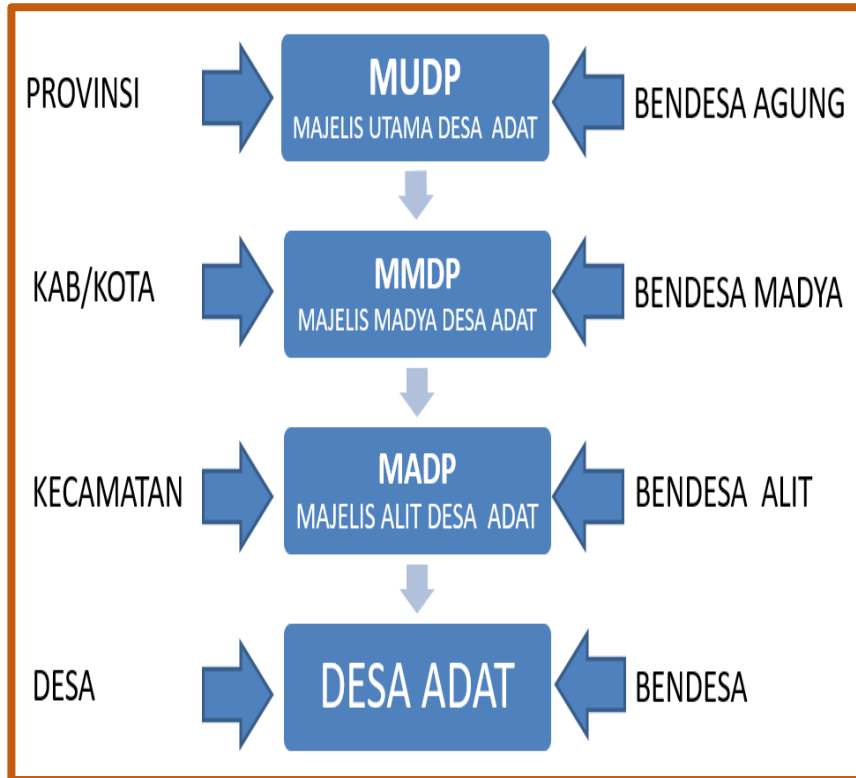
- ❑ Eksistensi Masyarakat Hukum adat di Bali sangat berbeda dengan masyarakat Adat lainnya yang ada di luar Bali
- ❑ Masyarakat Hukum Adat di Bali berkomunitas dalam DESA ADAT sebagaimana konsep dari Mpu Kuturan
- ❑ **DESA ADAT** adalah bagian dari kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat hindu secara turun temurun dalam **IKATAN KAHYANGAN TIGA** (kahyangan desa – PURA PUSEH – PURA DESA – PURA DALEM) yang mempunyai daerah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri;
- ❑ TIPE DESA ADAT : (1) DESA BALIAGE [Bali Mula] (2) DESA APANAGE [Pola Majapahit], DAN (3) DESA ADAT BARU [Pengembangan Akibat Perpindahan Penduduk]

SEBARAN DESA ADAT BALI

NO	KABUPATEN/ KOTA	KEC	KEDINASAN		DESA ADAT
			KELURAHAN	DESA	
1	BADUNG	6	16	46	122
2	BULELENG	9	19	129	170
3	BANGLI	4	4	68	168
4	GIANYAR	7	6	64	274
5	JEMBRANA	5	10	41	64
6	KARANGASEM	8	3	75	190
7	KLUNGKUNG	4	6	53	121
8	TABANAN	10	0	133	349
9	DENPASAR	4	16	27	35
JUMLAH		57	80	636	1493



“PEMERINTAHAN” DESA ADAT DI BALI



KEARIFAN LOKAL DESA ADAT DI BALI

Pengembangan Pariwisata Bali berbasis Masyarakat Adat tidak terlepas dari Beberapa Kearifan Lokal Bali yang menjadi landasan dalam membangun kepariwisataan Bali, yaitu :

❑ TRI HITA KARANA

❑ TRI MANDALA

❑ TRI ANGGA

❑ HULU TEBEN

❑ SAWEN



HARTA KEKAYAAN DESA ADAT DI BALI

- ☐ Harta kekayaan desa *adat* adalah kekayaan yang telah ada maupun yang akan ada yang berupa harta bergerak dan tidak bergerak, material dan inmaterial serta benda-benda yang bersifat religius magis yang menjadi milik *desa Adat*;
- ☐ DESA ADAT Memiliki Harta Kekayaan Sendiri, bahkan pada umumnya **LEBIH KAYA** Dari Desa Dinas (terutama terkait Kekayaan dalam bentuk Tanah)
- ☐ HARTA TIDAK BERGERAK – TANAH – TERSERTIFIKAT
 - ☐ TANAH PELABA PURA
 - ☐ TANAH AYAHAN DESA
 - ☐ TANAH PUPONAN DESA
- ☐ Pengelolaan harta kekayaan desa *adat* dilakukan oleh *Bendesa/Kelian Desa Adat bersama Prajuru* desa adat sesuai dengan *awig-awig* dan *Perarem desa adat* masing-masing;



PENGELOLAAN HARTA KEKAYAAN

- DESA ADAT BERWENANG MENGATUR PENGELOLAAN HARTA KEKAYAAN DESA ADAT – MENGURUS RUMAH TANGGA SENDIRI (PASAL 5 HURUF C – PERDA 03/2003 – AWIG DESA ADAT;
- SAMPAI SAAT INI DARI 1493 DESA ADAT BELUM MAKSIMAL MELAKUKAN PENGELOLAAN HARTA KEKAYAAN DAN SUMBER DAYA ALAMNYA
 - DITELANTARKAN;
 - DIKELOLA SECARA TRADISIONAL
 - DISERAHKAN KEPADA DESA DINAS
 - DIKERJASAMAKAN DENGAN PIHAK KETIGA DENGAN SISTEM SEWA KONTRAK
- UNTUK MEMAKSIMALKAN PENGELOLAAN POTENSI DESA ADAT [TERMASUK POTENSI PARIWISATANYA], MAKA PERLU DIKELOLA DENGAN LEBIH MAKSIMAL MELALUI MANAGEMEN MODERN – MANAGEMEN KEKINIAN – **BENTUK BUMDA ATAU BUMDESA**



DUALITAS KEPEMIMPINAN DESA

- Dalam pengembangan pariwisata Bali antara Desa Dinas dan Desa Adat merupakan dua komponen kekuatan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain – Bila dipisahkan akan mengakibatkan adanya dualisme kepemimpinan;
- Desa Adat memang merupakan desa yang sangat potensial dalam menunjang pariwisata di Bali, karena memiliki berbagai potensi sebagai aset pariwisata, di samping juga karena corak kepariwisataan di Bali adalah pariwisata budaya;
- Desa dinas memiliki kekuatan karena merupakan bagian dari Pemerintahan Negara yang ada di Desa;
- Dalam Mengembangkan pariwisata Desa yang berkelanjutan [termasuk juga pembangunan dalam arti luas], harus dibangun sinergisitas antara pemerintahan Desa Adat dan Desa Administrasi – **MEMBANGUN DUALITAS KEPEMIMPINAN DESA**





BUMDA INOVASI DESA ADAT KUTUH DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI WISATA BERBASIS DESA ADAT

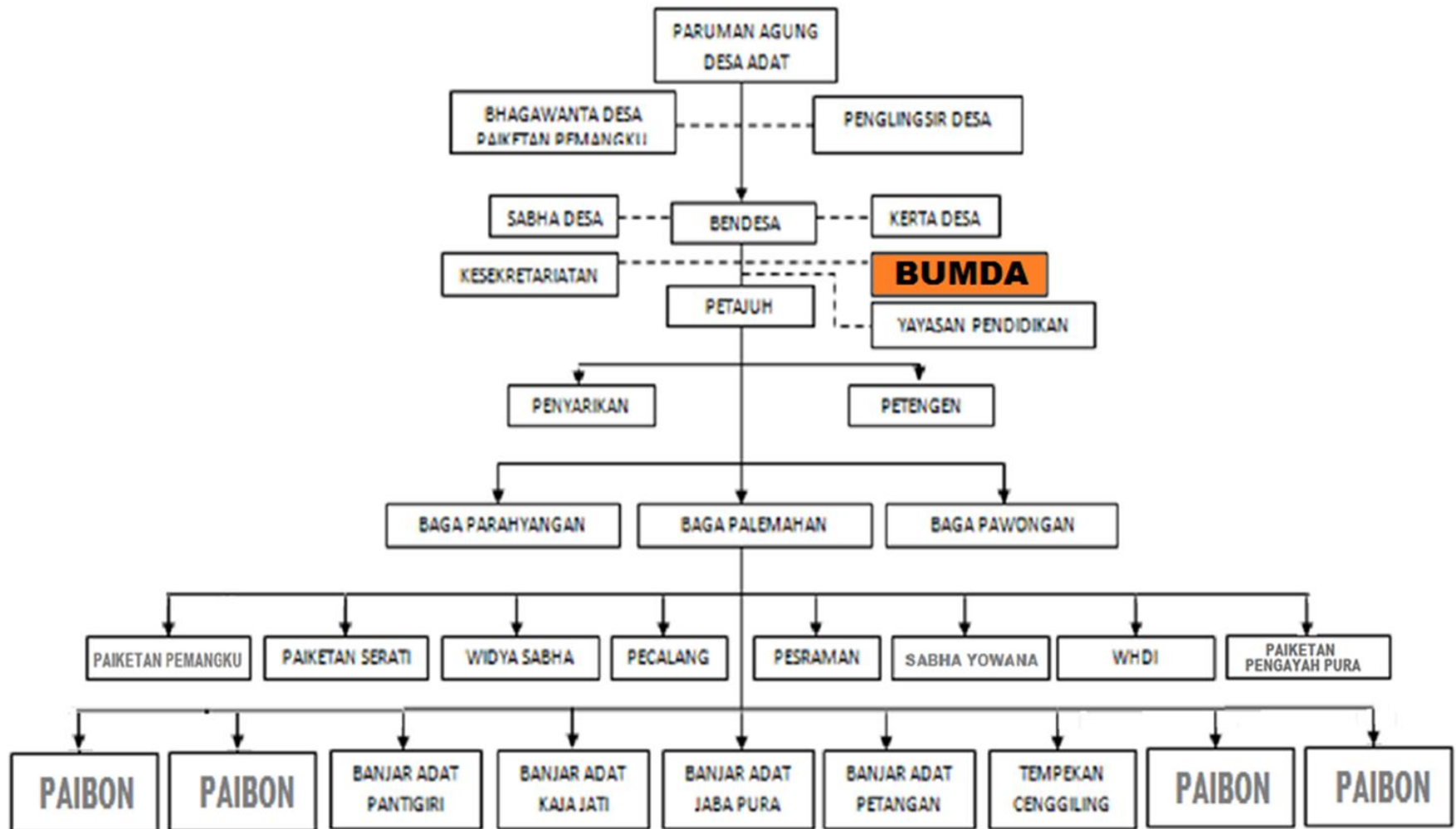


- ❑ DESA ADAT KUTUH DALAM SETIAP TAHUNNYA RATA-RATA MEMERLUKAN DANA SEBESAR **4 MILYARD RUPIAH** UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN RITUAL ADAT DAN AGAMA SERTA PEMERINTAHAN DESA ADAT;
- ❑ **SUMBER PENDAPATAN**
 - Urunan Krama *Desa Pakraman*;
 - Hasil Pengelolaan Kekayaan *Desa Pakraman* - **BUMDA**;
 - Hasil Usaha Lembaga Perkreditan Desa (LPD);
 - Bantuan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah;
 - Sumbangan Pihak Ketiga Yang Tidak Mengikat.
 - Pendapatan Lainnya Yang Sah;
- ❑ **POS PEMBIAYAAN – PENGELUARAN**
 - Belanja Bhaga Parhyangan
 - Belanja Bhaga Palemahan
 - Belanja Bhaga Pawongan
 - Belanja Kesekretariatan Desa Adat
 - Lain-lain Belanja Yang Sah



STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA ADAT KUTUH

BUMDA
INOVASI DESA





POTENSI WISATA ALAM

Fauna KERA, bentang alam Perbukitan, Tebing dan Pantai



POTENSI WISATA KEBUDAYAAN

Adat istiadat, Kesenian, Peninggalan sejarah berupa bangunan tempat Ibadah – Wisata Spiritual



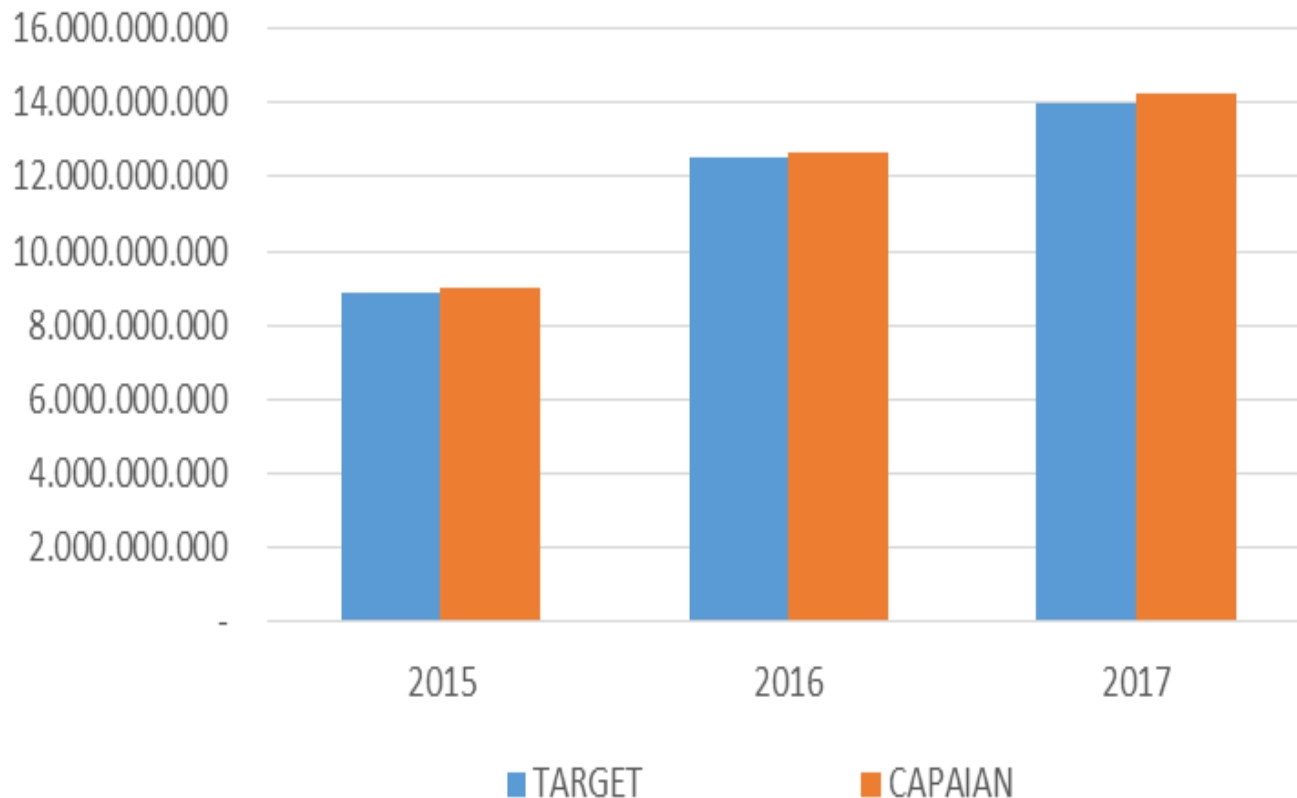
POTENSI WISATA BUATAN MANUSIA

Daya tarik wisata buatan berupa pementasan tarian, pementasan atau pertunjukan seni budaya

Sampai saat ini BUMDA [Bhaga Usaha Manunggal Desa Adat] memiliki 9 unit usaha dan 2 layanan, yaitu :

- ☐ UNIT LEMBAGA PERKREDITAN – BANK ADAT
- ☐ **UNIT PENGELOLA WISATA PANTAI PANDAWA**
- ☐ **UNIT PENGELOLA WISATA GUNUNG PAYUNG CULTURAL PARK**
- ☐ **UNIT ATRAKSI WISATA PARALAYANG**
- ☐ **UNIT ATRAKSI WISATA SENI DAN BUDAYA**
- ☐ UNIT DISTRIBUSI BARANG DAN JASA
- ☐ UNIT PIRANTI YADNYA
- ☐ UNIT TRANSPORTASI PANDAWA MANDIRI
- ☐ UNIT JASA KONSTRUKSI KARYA UNDAGI
- ☐ UNIT LAYANAN KEAMANAN DAN ASURANSI KESEHATAN
- ☐ UNIT LAYANAN WISATA EDUKASI

TARGET DAN CAPAIAN
KEUNTUNGAN BUMDA DESA KUTUH



- ❑ TELAH MENYERAP 250 - AN TENAGA KERJA, YANG SEMUANYA ADALAH KRAMA/PENDUDUK DESA KUTUH;
- ❑ TELAH MEMBERI KESEMPATAN KEPADA 160 LEBIH KEPALA KELUARGA MENJADI WIRAUSAHA PARIWISATA, DENGAN BERKUALAN DI KAWASAN PANDAWA DAN GUNUNG PAYUNG
- ❑ PEMANFAATAN DANA SOSIAL, DIANTARANYA :
 - Untuk **SANTUNAN KEMATIAN** Rp. 3.000.000,- / orang, ditambah ada alokasi dana Upakara APBDes sebesar Rp. 3.000.000,- sehingga Total Rp. 6 Juta/Orang
 - Untuk **BEASISWA PER-TAHUN** DENGAN TOTAL SEBESAR 150 JUTA RUPIAH LEBIH;
 - UNTUK **PUNIA UPAKARA PUJAWALI DI PAIBON**, Rp. 2.500.000,- PER PAIBON, ditambah ada alokasi dari APBDes, Rp. 5 JUTA, sehingga total menjadi Rp 7,5 Juta Per-Paibon
 - UNTUK **PUNIA UPAKARA PUJAWALI** DI MASING-MASING BANJAR Rp. 20.000.000,-
 - Untuk KEGIATAN TIRTAYATRA MASSAL (BATUR – BESAKIH) PER-TAHUN Rp. 40.000.000,-
- ❑ DAN LAINNYA ...



BEASISWA TINGKAT S M A



PUNIA PUJAWALI BANJAR PETANGAN



PEMBINAAN SENI DAN BUDAYA

TERDAPAT 4 STANDAR YANG DITERAPKAN DESA ADAT KUTUH UNTUK MENJAGA KEBERLANJUTAN KAWASAN WISATA DI DESA ADAT KUTUH, YAITU :

- 1. MENJAGA STANDAR PENGELOLAAN KAWASAN WISATA**
- 2. MENJAGA STANDAR PEMANFAATAN EKONOMI UNTUK MASYARAKAT**
- 3. MENJAGA STANDAR PELESTARIAN ADAT DAN BUDAYA BAGI MASYARAKAT DAN PENGUNJUNG**
- 4. MENJAGA STANDAR PELESTARIAN LINGKUNGAN**



- PEMERINTAH PERLU MENDORONG DAN MEMFASILITASI MASYARAKAT ADAT DI BALI PADA KHUSUSNYA DAN INDONESIA PADA UMUMNYA MENGELOLA POTENSI PARIWISATANYA;
- PEMERINTAH PERLU MENDORONG DAN MEMFASILITASI AGAR DANA DESA DIARAHKAN UNTUK MENGEMBANGKAN DAN MENGELOLA POTENSI PARIWISATA DESA MELALUI PENGUATAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, DENGAN MEMBENTUK LEMBAGA PENGELOLA YANG PROFESIONAL DIBAWAH NAUNGAN BUMDA/BUMDESA ;
- PEMERINTAH PERLU MENGARAHKAN DAN MEMFASILITASI AGAR BADAN PENGELOLA YANG DIBENTUK DAPAT MENGELOLA PARIWISATA SECARA TERINTEGRASI DENGAN USAHA EKONOMI KREATIF LAINNYA;





SEKIAN DAN
TERIMA KASIH